

PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH NEGARA INDONESIA



Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai suatu Negara yang mandiri dan berdaulat, sudah tentu memiliki ideologi sebagai dasar dan falsafah Negara. Pancasila menjadi pilihan para *founding father* dari Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dengan tepat dan mendasar untuk mengakomodir seluruh kepentingan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan majemuk.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sarat dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Pancasila menjadi landasan yang kuat dan pokok untuk berdiri dan bergeraknya negara Indonesia. Lima sila dalam Pancasila itu menjadi ruh energi penggerak bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara mencapai cita-cita luhur Negara Republik Indonesia.

Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk mempelajari dan memahami Pancasila dengan segala aspeknya. Demikian pula dengan para mahasiswa sebagai suatu generasi bangsa yang terpelajar, sudah tentu seharusnya mewajibkan diri untuk mempelajari Pancasila agar menjadi landasan setia gerak dan aktivitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negeri ini. Mata kuliah Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib Nasional yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah PTAIN yang berupa UIN, IAIN dan STAIN.

Melalui perkuliahan Pancasila, diharapkan mahasiswa mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, memaknai kebenaran ilmiah-filsafati Pancasila, memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa, berpikir integral tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, memahami konsep dasar tentang pemecahan persoalan sosial-politik dari perspektif yuridis, memecahkan persoalan sosial-politik dengan paradigma Pancasila.

Buku Pancasila ini memuat pokok-pokok pembahasan tentang pendidikan Pancasila yang terdiri atas: pengertian, landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila; Pancasila sebagai sistem filsafat; sejarah Pancasila; Pancasila sebagai etika politik dan ideologi bangsa Indonesia; Pancasila sebagai sistem nilai, sebagai paradigma kehidupan, serta tantangan Pancasila dalam era global.

Buku ini melengkapi pustaka yang menyajikan materi Pancasila untuk Perguruan Tinggi, penulis menambahkan nilai-nilai filosofis Pancasila dari perspektif kontemporer, dimana kemajuan zaman jelas menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi Pancasila khususnya pada generasi muda. Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Begitu juga melalui mata kuliah Pancasila yang menjadi mata kuliah wajib secara nasional di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Semoga, buku ini dapat bermanfaat dalam upaya pembelajaran tentang Pancasila untuk Perguruan Tinggi.

Yogyakarta, Februari 2020

Penulis,

Muh. Wasith Achadi

DAFTAR ISI

Sampul.....	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Bab I. Pancasila, Landasan dan Tujuan	5
Bab II. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat	10
Bab III. Pancasila dalam Sejarah Indonesia	17
Bab IV. Pancasila Sebagai Etika Politik dan Ideologi Negara	28
Bab. V. Pancasila Sebagai Sistem Nilai	44
Bab VI. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan	56
Bab VII. Tantangan Pancasila Dalam Era Global	68
Daftar Pustaka	73

BAB I

PANCASILA, LANDASAN DAN TUJUAN

A. Pengertian Pancasila

1. Secara Etimologis (Asal Kata)

Secara etimologis, istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana). Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu:

“panca” artinya *“lima”*

“syila” vokal I pendek artinya *“batu sendi”*, *“alas”*, atau *“dasar”*

“syiila” vokal i pendek artinya *“peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”*

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan *“susila”* yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “PancaSyilla” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal *“berbatu sendi lima”* atau secara harfiah *“dasar yang memiliki lima unsur”*. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.¹

2. Pengertian Pancasila secara Historis

Proses perumusan dasar negara diawali pada sidang BPUPKI yang pertama, Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang memimpin pembahasan pada sidang tersebut. Kemudian tampilah tiga tokoh pembicara yang mengemukakan gagasan mereka tentang rumusan dasar Negara. Mereka adalah Muh.Yamin, Mr.Soepomo, dan Ir.Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai rumusan dasarnegara Indonesia. Kemudian untuk

¹Prof.Dr. Kaelan,M.S, *PendidikanPancasila*, (Yogyakarta, Paradigma, 2010),hlm 21

memberikan nama “pancasila yang artinya lima dasar, hal ini menurut Ir. Soekarno atas saran salah satu temannya ahli bahasa.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.²

3. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan Negara Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan Negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam pembukaan UUD 1945 di dalam alinea yang ke-4 terdapat pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

² *Ibid.* hal: 23

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.³

B. Landasan

1. Landasan Historis

- a. Jati diri bangsa berkembang melalui proses sejarah yang panjang mulai dari kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa penjajah.
- b. Ketika merdeka maka para pendiri negara bangsa Indonesia merumuskan ciri khas, sifat dan karakter bangsa yg mandiri dan berbeda.
- c. Lahirlah Pancasila sebagai kepribadian bangsa

2. Landasan Kultural

- a. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yg dimiliki dan dilaksanakan dalam kehidupan, diangkat dari nilai-nilai kultural bangsa Indonesia.
- b. Perumusan nilai-nilai kultural melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara pada akhirnya melahirkan Pancasila.
- c. Melanjutkan dan mewariskan nilai-nilai Pancasila tersebut melalui pendidikan.

3. Landasan Filosofis

- a. Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia.
- b. Secara filosofis dan objektif, bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila.
- c. Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum berdiri merupakan bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan.
- d. Nilai-nilai kepribadian Pancasila merupakan dasar filsafat negara.

4. Landasan Yuridis

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- b. Pasal 37, menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, dan jenjang pendidikan, wajib memuat Pendidikan Kepribadian (Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa)

³ Ibid.26

- c. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 265/Dikti/Kep/2000: 1). Pasal 1 bahwa mata kuliah Pendidikan Kepribadian yang mencakup unsur Filsafat Pancasila, agama, dan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah umum pada susunan Kurikulum Inti Perguruan Tinggi, 2). Pasal 2, Mata Kuliah Pendidikan Kepribadian adalah mata kuliah wajib untuk diambil setiap mahasiswa program diploma dan program sarjana

C. Tujuan

1. Memahami, menghayati, dan melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD'45 dalam kehidupannya sebagai WNI
2. Mengusai Pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD '45
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi tantangan zaman
4. Membantu dalam proses belajar, proses berfikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila

Sedangkan secara umum Tujuan Pendidikan Pancasila adalah: “Mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti digariskan dalam pembukaan UUD'45. Pada akhirnya dapat menghayati filsafat dan ideologi Pancasila, sehingga menjiwai perilakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam melaksanakan profesinya”.

Hasil yang diharapkan dari Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa adalah, mewujudkan mahasiswa Indonesia yang:

1. Beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Berperikemanusiaan yang adil dan beradab
3. Mendukung persatuan bangsa

4. Mendukung kerakyataan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

BAB II

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A. PENGERTIAN

Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu, dan saling berkualitas yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Jadi Pancasila pada dasarnya satu bagian/unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing.

Pancasila sebagai sistem Filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari lima sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Filsafat negara kita ialah Pancasila, yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup.

Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh.⁴

Dalam Lokakarya Pengamalan Pancasila yang diadakan di Yogyakarta sekitar tahun 1976, Notonagoro mengatakan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam kalimat keempat daripada Pembukaan UUD 1945, bahwa “Disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang berbentuk dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Kata-kata *dengan berdasar kepada* tersebut menentukan kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara, dalam pengertian *dasar filsafat*. Dasar filsafat, asas kerohanian negara Pancasila adalah cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa kita

Dalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 Mr. Moh. Yamin, menyebutkan: “Ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai konsep filsafati merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat sendiri merupakan

⁴ Soerjanto Poespowadojo, *Filsafat Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 12-13.

suatu kebudayaan, yaitu suatu hasil kreasi manusia atau dengan kata lain sebagai hasil produk manusia.⁵

B. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

1. Pengertian Sistem

Pengertian tentang sistem dapat mengacu pada benda-benda konkrit maupun abstrak. Kita sering mendengar atau membaca istilah-istilah, misalnya, sistem nilai budaya, sistem politik, sistem pendidikan, dan sebagainya.

Menurut Fowler (1964), yang dimaksud dengan system adalah: *"Complex whole, set of connected things of parts, organized body of material or immaterial things"*. Sedangkan menurut Webster's New American Dictionary, yang dimaksud dengan system adalah: *"A combination of part into whole, as a bodily system, the digestive system, a railroad system, the solar system"*.

Hornby (1973) mengartikan sistem sebagai: *"(1) group of things or parts working together in a regular relation: the nervous system, the digestive system, the railway system. (2) ordered set of ideas, theories, principles etc. a system of philosophy; a system of government...."*

Kemudian dalam The Concise Oxford Dictionary Of Current English, yang dimaksud sistem filsafat adalah *set of coordinated doctrines* atau "kumpulan dari ajaran-ajaran yang terkoordinasikan". Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah:

- a. Dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau bagian. Dalam suatu sistem abstrak, unsur ini berwujud pandangan dan ajaran tentang suatu hal.
- b. Unsur-unsur yang termuat dalam sistem saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang menyeluruh.
- c. Hubungan diantara unsur-unsur tersebut bersifat tetap.
- d. Dalam suatu sistem termuat adanya maksud atau tujuan yang ingin dicapai.⁶

⁵ Hartati Soemasdi, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Andi Offset IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1985), hlm. 47-48.

⁶ Ali Mudhofir, *Pancasila sebagai Sistem Kefilsafatan*, (Jurnal filsafat ugm, Desember, 1996) hlm. 9-10.

2. Pengertian Filsafat

Filsafat berasal dari kata *Philos* yang berarti cinta atau sahabat dan *Sophia* yang berarti kebijaksanaan. Jadi dapat difahami bahwa arti dari kata filsafat adalah seseorang yang cinta terhadap kebijaksanaan, sehingga mendorong dirinya untuk berlaku adil dengan menyesuaikan pada kebutuhan masing-masing.

Selain itu, filsafat juga diartikan sebagai *pandangan hidup seseorang*, atau *ilmu tentang segala sesuatu*. Filsafat itu sendiri mengajarkan bagaimana cara berfikir yang mendasar, radikal, dan mendalam dalam memberikan hakikat.⁷

3. Pancasila Dalam Pendekatan Filsafat

Yang dimaksud dengan Pancasila dalam pendekatan filosofis adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia (Syarbaini; 2003).⁸

Untuk dapat memahami Pancasila secara mendalam dan mendasar, maka kita harus mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila. Berikut uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila:

- a. Nilai Ketuhanan
- b. Nilai Kemanusiaan
- c. Nilai Persatuan
- d. Nilai Kerakyatan
- e. Nilai Keadilan
- f. Nilai-nilai tersebut selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun dalam filsafat Pancasila, juga disebutkan bahwa ada 3 tingkatan nilai, yaitu:

a. Nilai Dasar

Yaitu nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar yaitu asas- asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi.

⁷ Usman, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2018), hlm. 3.

⁸ Winarmo, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 2.

b. Nilai Instrumental

Yaitu nilai dari pelaksanaan umum nilai dasar. Umumnya berbentuk norma social dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.

c. Nilai Praktis

Yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia.⁹

Itulah mengapa Pancasila dikenal sebagai sistem filsafat negara. Karena Pancasila merupakan rumusan filsafati atau dapat dikatakan nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai filsafat. Oleh karena itu, harus dibedakan antara filsafat dengan dasar hukum negara. Pancasila adalah dasar filsafat negara, sedangkan UUD 1945 adalah dasar hukum negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normative, dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara.

C. PELAKSANAAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Untuk mencapai tujuan suatu bangsa perlu adanya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dan masyarakat sangat berkaitan, karena Pancasila merupakan pandangan hidup suatu bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sampailah saatnya bangsa kita untuk betul-betul membudayakan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara.

Dalam Krida ketiga dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V, BP-7 Pusat bermaksud untuk berperan aktif dalam merangsang gerakan pembudayaan ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, dan P-4 (Eka Prasetya Pancakarsa) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gerakan pembudayaan atau juga berarti

⁹ Winarmo, S.Pd., M.Si, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 5.

pengalamannya dalam kehidupan nyata adalah pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan tuntutan perubahan jaman, tetapi tetap berada dalam kerangka paradigma atau kandungan hakikat yang sesungguhnya.

Pengembangan pemikiran bukanlah dimaksudkan untuk merubah atau merevisi apalagi menggantinya. Justru yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat, mempermantapkan, dan mengembangkan penghayatan, kebudayaan, dan pengamalannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan UUD 1945 diharapkan bangsa kita dapat melahirkan dan mengembangkan gagasan, konsep-konsep bahkan teori-teori baru dalam berbagai bidang kehidupannya yang bersumber dari idiologi dan konstitusi, serta pada waktu yang sama berhasil pula menguatkan relevansinya dengan realita perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan jaman.¹⁰

Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (sila I), dengan sesama manusia (sila II), dengan tanah air dan nusa bangsa Indonesia (sila III), dengan kekuasaan dan pemerintahan negara (sila IV), dan dengan negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi kesejahteraan (sila V).

Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta merupakan ciri khas yaitu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan bermasyarakat sebagai berikut:

1. Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religious, antara lain:
 - a. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci.
 - b. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangannya.

Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyayangi binatang, menyayangi dan merawat tumbuh-tumbuhan, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya.

¹⁰ Oetojo Oesman Alfian, *Pancasila sebagai Idiologi: dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm.1-6.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini antara lain:
- a. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya.
 - b. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan.
 - c. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.

Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup, dan hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya (Koesnadi Hardjosoemantri, 2000: 558). Dalam hal ini masyarakat dapat mengamalkannya dengan mengadakan tingkat pengendalian tingkat polusi udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya.

3. Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa. Berikut aspek-aspek yang perlu diperhatikan:
- a. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme.
 - b. Pengakuan terhadap kebhineka tunggal ikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa.
 - c. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionlisme).

Penerapan sila ini yaitu dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerapan dan penyuluhan dalam pengenalan tat nilai

tradisional dan tat nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan.

4. Dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Beberapa hal yang harus dicermati yaitu:

- a. Kedaulatan negara di tangan rakyat
- b. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan.
- c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- d. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Penerapan sila ini dapat dilakukan dengan mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan, dan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

5. Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Perlakuan adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
- b. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak milik orang lain.
- d. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.¹¹

¹¹"Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari", <https://pancasils2013.weebly.com/penerapan-pancasila-dalam-kehidupan.html>.

BAB III

PANCASILA DALAM SEJARAH INDONESIA

A. Nilai-Nilai Pancasila Pada Masa Perjuangan Bangsa Indonesia

1. Zaman Penjajahan Belanda

Setelah majapahit runtuh pada mula abad XVI maka berkembanglah agama islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama itu berkembang pula kerajaan islam seperti kerajaan demak dan mulai lah berdatangan orang-orang portugis yang kemudian di ikuti oleh orang-orang spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.

Pada mulanya bangsa portugis hanya berdagang di Indonesia namun dengan berjalannya waktu bangsa portugis mulai menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan seperti pada tahun 1511 portugis saat menguasai Malaka

Pada akhir abad ke XVI bangsa belanda datang keindonesia untuk menghindari persaingan antara belanda dengan portugis. Kemudian mereka mendirikan VOC. Pada saat itu Mataram dibawah pemerintahan Sultan Agung berupaya mengadakan perlawanan dan penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubernur Jendral J.P Coen tewas dalam serangan yang ke dua kemudia Mataramtidak lagi ada VOC. Di makassar yang memiliki kedudukan yang sangat vital juga dikuasai VOC sehingga timbullah perlawanan dari rakyat Makassar di bawah pimpinan Hasanuddin menyusul pula Banten oleh Sultan Agung Tirtiyoso pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di jawa timur pada akhir abad XVI, nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasaan VOC, demikian Belanda pada awalnya menguasai daerah-daerah yang strategis yang kaya akan hasil rempah-rempah pada abad XVII dan Nampak semakin memperkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer.

Pada abad itu sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaan di Indonesia. Melihat panjajahan Belanda tersebut maka meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah Nusantara antara lain: Pattimura di Maluku, Pangeran Diponegoro dan masih banyak perlawanan lainnya . penghisapan mulai memuncak ketika belanda mulai merapkan

sistem monopoli melalui tanam paksa dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yang tidak berdosa.

2. Kebangkitan Nasional

Dengan kebangkitan dunia timur pada abad ke XX di panggung politik Internasional tumbuh kesadaran dan kekuatan sendiri , adapun Indonesia bergejolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidi Sudirohusodo diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 mei 1908 gerakan inilah yang merupakan awal gerakan Nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuasaannya sendiri. Sehingga setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya seperti: Serikat Dagang Islam (SDI) , Partai Nasional Indonesia (PNI). Perjuangan rintisan kesatuan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 oktober 1928 pada saat itu juga lagu Indonesia Raya pertama kali dikumndangkan dan seklaigus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran bangsa

B. Zaman Penjajahan Jepang

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Tiga A, Nippon cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia, serta mengaku sebagai saudara tua Bangsa Indonesia. Dalam perang melawan Sekutu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis dan Belanda), Jepang mulai terdesak, maka untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito, beliau memberi hadiah ulang tahun untuk Bangsa Indonesia, yaitu janji kedua dari pemerintah Jepang berupa “Kemerdekaan tanpa syarat” melalui Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), No. 23. Dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan dianjurkan untuk berani mendirikan Negara Indonesia Merdeka dihadapan musuh-musuh Jepang, yaitu Sekutu yang di dalamnya terdapat kaki tangannya, yaitu NICA (Netherlands Indie Civil Administration). Realisasi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, berupa dibentuknya suatu badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai, yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat.

C. Proses Perumusan Pancasila

1. Sidang BPUPKI Pertama

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga "Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda" pada masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara "Indonesia Merdeka" serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer Jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.

Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk "**Negara Kesatuan Republik Indonesia**" ("NKRI"), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.
2. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "**Dasar Negara Indonesia Merdeka**", yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.
3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "**Pancasila**", yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "**Pancasila**", masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi "**Trisila**" (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "**Ekasila**" (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satu-kesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI

yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan "Panitia Sembilan" dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Naskah Asli "**Piagam Jakarta**" atau "Jakarta Charter" yang dihasilkan oleh "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni 1945

Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah "Panitia Sembilan" tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari "Panitia Sembilan" ini adalah sebagai berikut :

1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
8. Haji Agus Salim (anggota)
9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (kelompok "Nasionalis") dan 4 orang dari kaum keagamaan (kelompok "Islamis"), maka pada tanggal 22 Juni 1945 "Panitia Sembilan" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal

dengan sebutan "**Piagam Jakarta**" atau "Jakarta Charter", yang pada waktu itu juga disebut-sebut sebagai sebuah "Gentlement Agreement". Setelah itu sebagai ketua "Panitia Sembilan", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan "Indonesia Merdeka" yang disebut dengan "Piagam Jakarta" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Masa di antara dua waktu persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan "Pembukaan (bahasa Belanda: "Preamble") Undang-Undang Dasar 1945", yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).

2. Sidang BPUPKI Kedua

Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 14 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia *Perancang Undang-Undang Dasar* (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia *Pembelaan Tanah Air* (diketuai oleh Raden Abikusno

Tjokrosoejoso), dan Panitia *Ekonomi dan Keuangan* (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).

Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia *Perancang Undang-Undang Dasar*, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :

1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
6. Haji Agus Salim (anggota)
7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia *Perancang Undang-Undang Dasar*, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.

Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia *Perancang Undang-Undang Dasar*, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :

1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar 1945", yang isinya meliputi :
 - a. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta

- wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya,
- b. Bentuk negara Indonesia adalah *Negara Kesatuan*,
 - c. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah *Republik*,
 - d. Bendera nasional Indonesia adalah *Sang Saka Merah Putih*,
 - e. Bahasa nasional Indonesia adalah *Bahasa Indonesia*.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksion yang sedikit berbeda.

D. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara *Indonesia Merdeka*, dan digantikan dengan dibentuknya "***Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia***" (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: *Dokuritsu Junbi Inkai* dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

Tugas "PPKI" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: *preamble*) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.

Anggota "PPKI" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah *Hindia Belanda*, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. "PPKI" ini diketuai oleh Ir. Soekarno,

dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota "PPKI" ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.

Secara simbolik "PPKI" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke "*Kota Ho Chi Minh*" atau dalam bahasa Vietnam: *Thành phố Hồ Chí Minh* (dahulu bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong, Vietnam.

Pada saat "PPKI" terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang "PPKI". Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa "PPKI" ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak "PPKI" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru.

Tetapi cepat atau lambatya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari "PPKI". Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada "PPKI". Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah "PPKI" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujudkan-nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Ir. Soekarno dengan didampingi Drs. Mohammad Hatta, membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Mohamad Ibnu

Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 tahun Jepang di Rumah Jalan Pegangsaan Timur no. 56, Jakarta. Adapun bunyi teks proklamasi tersebut adalah:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l, diselenggarakan dengan tjara saksama dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

Sementara itu dalam sidang "PPKI" pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang *beragama non-Muslim* serta pihak kaum keagamaan yang *menganut ajaran kebatinan*, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak "*Nasionalis*") guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang *beragama Islam* guna dihapuskannya "***tujuh kata***" dalam "*Piagam Jakarta*" atau "*Jakarta Charter*".

Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang "PPKI" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai "*pembukaan* (bahasa Belanda: "*preamble*") dan *batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945*", yang saat ini biasa disebut dengan hanya *UUD '45* adalah:

- **Pertama**, kata "*Mukaddimah*" yang berasal dari bahasa Arab, *muqaddimah*, diganti dengan kata "*Pembukaan*".

- **Kedua**, anak kalimat "*Piagam Jakarta*" yang menjadi pembukaan *Undang-Undang Dasar 1945*, diganti dengan, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*".
- **Ketiga**, kalimat yang menyebutkan "*Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam*", seperti tertulis dalam **pasal 6 ayat 1**, diganti dengan mencoret kata-kata "*dan beragama Islam*".
- **Keempat**, terkait perubahan *poin Kedua*, maka **pasal 29 ayat 1** dari yang semula berbunyi: "*Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" diganti menjadi berbunyi: "*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*".

"PPKI" sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap "PPKI" sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang, namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan, apalagi kita lupakan. Anggota "PPKI" telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya "PPKI" dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri.

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DAN IDEOLOGI NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Etika Politik

Etika politik dan filsafat saling berhubungan. Etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat, sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Ada beberapa bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan. Dalam hal ini termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum berlaku dan sebagainya.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis, untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif, dan etika politik tidak langsung terjun kepada politik praktis. Etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik.

Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, dan kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi, etika politik membahas hukum dan kekuasaan dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum tanpa kekuasaan negara tidak dapat berbuat apa-apa, dan hukum tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. Sedangkan negara tanpa hukum berarti buta. Negara yang memakai kekuasaannya diluar hukum sama dengan manusia yang berbuat tanpa pengertian. Negara semacam itu akan menjadi negara penindas dan mengerikan.

Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita *the rule of law*, partisipasi demokratis masyarakat

jaminan hak-hak asasi manusia menurut paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial.¹²

B. Pengertian Ideologi Negara

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk, yaitu idea dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani eidos dan logos. Secara sederhana, ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam artian ini, ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Artian ini disebut juga ideologi tertutup. Kata ideologi sering juga dijumpai untuk pengertian memutlakkan gagasan tertentu, sifatnya tertutup, di mana teori-teori bersifat pura-pura dengan kebenaran tertentu, tetapi bertentangan dengan menyembunyikan kepentingan kekuasaan tertentu yang sebenarnya. Dalam hal ini, ideologi diasosiasikan kepada hal yang bersifat negative

Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Bahan Penataran BP-7 Pusat, 1993) Suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi suatu falsafah hidup, apabila telah mendapat landasan berpikir maupun motivasi yang lebih jelas, sedangkan kristalisasinya kemudian membentuk suatu ideologi. Keterikatan ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan bangsa lain..

Ideologi dipandang sebagai pemikiran yang timbul karena pertimbangan kepentingan. Sedangkan ilmu, filsafat, ataupun teologi merupakan pemikiran yang bersifat refleksi, kritis, dan sistematis dimana pertimbangan utamanya adalah kebenaran pemikiran. Karena perbedaan itu ideologi disebut sebagai suatu sistem pemikiran yang

¹² Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila implementasi nilai-nilai karakter bangsa di perguruan tinggi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) hlm 29

sifatnya tertutup. dalam perkembangan itu ideologi mempunyai arti yang berbeda. Pertama ideologi diartikan *weltanschung*, yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat, negara (science of ideas).¹³

Pancasila sebagai ideologi nasional

Ideologi adalah istilah yang sejak lama telah dipakai dan menunjukkan beberapa arti. Menurut Destutt de Tracy pada tahun 1776, semua arti itu memakai istilah ideologi dengan pengertian *science of ideas* yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. dalam orientasi ini ideologi mempunyai pandangan tentang alam, masyarakat, manusia dan segala realitas yang dijumpai serta dialami semasa hidupnya.

Terdapat empat tipe ideologi, yaitu :

1. Ideologi konservatif. yaitu ideologi yang memelihara keadaan yang ada (status quo) setidaknya tidaknya secara umum , walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis.
2. Kontra ideologi yaitu melegitimasi penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah dianggap baik.
3. Ideologi reformasi yaitu ideologi yang bertujuan mengubah keadaan.
4. Ideologi revolusioner yaitu ideologi yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai masyarakat.

Kita mengenal berbagai istilah ideologi, seperti ideologi negara, ideologi bangsa dan ideologi nasional. Ideologi nasional , ideologi nasional ,ideologi negara khusus dikaitkan dengan pengaturan penyelenggara pemerintah negara . sedangkan ideologi nasional mencakup bagi bangsa Indonesia ,ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa bagi bangsa Indonesia ,ideologi nasionalnya tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

¹³Syahrial Syarbaini, *Ibid*, hlm 53

Ideologi nasional bangsa Indonesia tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi perjuangan yaitu sarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara merdeka,bersatu,berdaulat,adil,dan makmur.

Pancasila sebagai ideologi nasional,dapat sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita cita mengenai sejarah ,manusia,masyarakat,hukum,dan negara Indonesia yang bersumber dari Kebudayaan Indonesia

C. Pengertian Nilai, Moral, dan Norma

Nilai, moral, dan norma merupakan konsep yang saling berkaitan. Ketiga konsep ini saling terkait dalam memahami Pancasila sebagai etika politik.

a. Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia.

Disamping teori nilai diatas, Prof. Notonegoro membagi nilai dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
- 2) Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktifitas.
- 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dirinci menjadi empat macam, yaitu:
 - a) Nilai kebenaran, yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, budi, dan cipta.
 - b) Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi.
 - c) Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan.
 - d) Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dan keimanan manusia terhadap Tuhan¹⁴.

¹⁴Syahrial Syarbaini, Ibid., hlm. 33-34.

b. Moral

Moral berasal dari kata *mos* (*mores*) = kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia¹⁵.

c. Norma

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya merupakan perwujudan marabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk di patuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya:

- 1) Norma agama, dengan sanksinya dari tuhan.
- 2) Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri.
- 3) Norma kesopanan, dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat.

Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau denda yang dipaksakan oleh alat negara

D. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sistem Etika Politik

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan dijamin dalam kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat ataupun penguasa. Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik meliputi berbagai aktifitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan serta selalu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁵ Syahril Syarbaini, *Ibid.*, hlm. 34.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral). Jadi Pancasila merupakan tolok ukur moralitas suatu penggunaan kekuasaan dan penegakan hukum.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, sang pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zat-Nya, sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Atas keyakinan demikianlah, maka Negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama. Bagi semua warga tanpa kecuali tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi : “ negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa” dan “ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”¹⁶.

Pernyataan tersebut secara normatif merupakan artikulasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, harus diingat, pernyataan tersebut bukan sebuah penegasan bahwa Indonesia adalah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara berdasarkan legitimasi religius, dimana kekuasaan kepala negara bersifat absolut atau mutlak. Dengan demikian sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia¹⁷.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. *Beradab* kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur dan susila.

¹⁶ Syahril Syarbaini, *Ibid*, hlm. 39

¹⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 93

Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan ...”. Selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945¹⁸.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mempunyai keterkaitan sangat erat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua sila tersebut memberikan legitimasi moral religius (sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan legitimasi moral kemanusiaan (sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) dalam kehidupan dan proses penyelenggaraan negara, sehingga Indonesia terjerumus kedalam negara kekuasaan (*machtsstaats*)¹⁹.

3. Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang berabeka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia memberikan suatu penegasan bahwa negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam hal Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, dimana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”. Selanjutnya dapat dilihat dalam batang tubuh UUD 1945.²⁰

Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu paham kebangsaan Indonesia bukanlah paham kebangsaan yang sempit (*chauvinistis*), tetapi paham kebangsaan yang

¹⁸ Syahril Syarbaini, *Ibid*, hlm. 40-41.

¹⁹ Kaelan, *Ibid*, hlm. 94.

²⁰ Syahril Syarbaini, *Ibid*, hlm. 41.

selalu menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan²¹.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga merupakan sumber etika politik bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan diarahkan senantiasa untuk rakyat. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut system demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu, "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat ...". Selanjutnya lihat dalam pokok pasal-pasal UUD 1945²².

Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga Negara Indonesia baik yang tinggal didalam negeri maupun yang di luar negeri. Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yaitu "Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia ... Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"²³.

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi aspek keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara, yang

²¹Elly M. Setiadi, , *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 163.

²²Syahrial Syarbaini, *Ibid*, hlm. 42.

²³Syahrial Syarbaini, *Ibid*, hlm. 42.

menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara, yang bisa mengakibatkan hancurnya tatanan hidup kenegaraan serta terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula²⁴.

E. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' serta sila kedua 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Negara Indonesia yang berdasarkan sila I 'Ketuhanan Yang Maha Esa' bukanlah negara 'Teokrasi' yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Selain sila I, sila II 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara pada prinsipnya merupakan

²⁴Elly M. Setiadi, Dra, M.Si., op. cit, hlm. 164.

persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III). Oleh karena itu manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dalam kehidupan negara. Manusia merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan juga harus memiliki prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan:

1. Asas Legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku,
2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis), dan
3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral) (lihat Suseno, 1987:115).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius (sila I) serta moral kemanusiaan (sila II). Hal ini ditegaskan oleh Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjerumus ke dalam *machtsstaats* atau negara kekuasaan.

Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip 'legalitas'. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu 'keadilan' dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara.

Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legimitasi dari rakyat, atau dengan lain perkataan harus memiliki 'legitimasi demokratis'.

Prinsip-prinsip dasar etika politik itu dalam realisasi praktis dalam kehidupan kenegaraan senantiasa dilaksanakan secara korelatif diantara ketiganya. Kebijaksanaan serta keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan baik menyangkut politik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi baik nasional maupun global, yang menyangkut rakyat, dan lainnya selain berdasarkan hukum yang berlaku (legimitasi hukum), harus mendapat legitimasi rakyat (legitimasi demokratis) dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip moralitas (legitimasi moral). Misalnya kebijaksanaan harga BBM, Tarif dasar Listrik, Taris Telepon, kebijakan politik dalam maupun luar negeri harus didasarkan atas tiga prinsip-prinsip tersebut.

Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, anggota DPR maupun MPR aparat pelaksana dan penegak hukum, harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar pada legitimasi moral. Sebagai contoh, suatu kebijaksanaan itu sesuai dengan hukum tetapi belum tentu sesuai dengan moral. Misalnya gaji para Pejabat dan anggota DPR, MPR itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita belum tentu layak secara moral (legitimasi moral)²⁵.

²⁵ Kaelan, *Ibid.* hlm. 93-95.

F. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri dan berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa.²⁶

Pengertian *ideologi* secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan serta kepercayaan-kepercayaan yang bersifat sistematis yang memberikan arah dan menyangkut tingkah laku sekelompok manusia tertentu, dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini menyangkut berbagai bidang kehidupan yaitu :

- a) Bidang politik, termasuk di dalamnya bidang hukum, pertahanan dan keamanan.
- b) Bidang sosial
- c) Bidang kebudayaan
- d) Bidang keagamaan

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

- a) Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b) Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban²⁷

1. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Suatu ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan uday masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan ditemukan dalam

²⁶ Kaelan, M.S., *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998) hlm. 62.

²⁷ Kaelan, *Ibid.*, hlm. 63

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan masyarakat dalam menentukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut.²⁸

Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila (Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan) dan Pembukaan UUD 1945. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal, sehingga dalam nilai dasar terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar.
- b. Nilai Instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksananya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.
- c. Nilai Praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁹

Suatu ideologi juga harus memiliki norma yang jelas karena ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praksis yang merupakan suatu pengalaman nyata. Oleh karena itu Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki tiga dimensi yaitu:

- a. Dimensi Idealisme, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal, bukanlah lambungan angan-angan yang sama sekali tidak mungkin direalisasikan.³⁰
- b. Dimensi Normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan *Staatsfundamentalnorn* (Pokok Kaidah negara yang Fundamental).

²⁸ Kaelan, *Ibid.*, hlm. 114.

²⁹ Kaelan, *Ibid.*, hlm. 65.

³⁰ Syahril Syarbaini, *Ibid.*, hlm. 62

Dalam pengertian ini Ideologi Pancasila agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional, maka perlu memiliki norma yang jelas.³¹

- c. Dimensi Realitas, Nilai-nilai yang terkandung dalam diri seseorang yang bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat.
- d. Dimensi Fleksibilitas, melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu mempersegar dirinya, memelihara, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yang juga diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa.

2. Pancasila sebagai Ideologi Tertutup

Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Suatu ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Dengan demikian ciri ideologi tertutup, bahwa atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Demi ideologi masyarakat harus berkorban, dan kesediaan itu untuk menilai kepercayaan ideologi para warga masyarakat serta kesetiaannya masing-masing sebagai masyarakat.

Isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang mungkin hidup dalam masyarakat itu, akan selalu ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Dan itu berarti juga orang harus taat kepada elite yang mengembannya, taat terhadap ideologis itu. Tuntutan ketaatan itu mutlak, dan orang tidak diizinkan untuk mempersoalkannya lagi, misalnya berdasarkan hati nuraninya, tanggung jawabnya atas hak-hak asasinya. Kekuasaannya selalu

³¹ Kaelan, *Ibid.* hlm. 116.

condong ke arah total. Jadi bersifat totaliter dan akan menyangkut segala kehidupan.³²

G. Makna Ideologi Pancasila Bagi Negara

Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi proklamasi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, serta penjelasan UUD 1945.

Pancasila bersifat integralistik yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara. Pancasila yang melandasi kehidupan bernegara menurut Supomo adalah dalam kerangka negara integralistik untuk membedakan paham-paham yang digunakan oleh pemikir kenegaraan lain. Untuk memahami konsep Pancasila bersifat integralistik maka terlebih dahulu kita harus melihat beberapa teori (paham) mengenai dasar negara yaitu sebagai berikut:

1. Teori perseorangan (individualistik)

Sarjana-sarjana yang membahas teori individualistik adalah Herbert Spencer (1820-1903) dan Horald J. Laski (1893-1950). Pada intinya menurut teori ini negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu (*social contract*). Hal ini mempunyai pengertian bahwa negara dipandang sebagai organisasi kesatuan pergaulan hidup manusia yang tertinggi. Manusia sebagai individu hidup bebas dan merdeka tidak ada yang di bawah oleh orang lain karena semua dalam kedudukan dan taraf yang sama.

2. Teori golongan (*class theory*)

Menurut Karl Marx negara merupakan penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat oleh mereka yang kuat untuk menindas golongan ekonomi yang lemah. Yang dimaksud dengan golongan ekonomi yang kuat adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Negara akan lenyap dengan sendirinya kalau dalam masyarakat sudah tidak ada

³² Prof. Dr. H. Kaelan, Ibid.,. hlm. 113.

lagi perbedaan kelas dan pertentangan ekonomi (Soehino,1986: 133). Menurut Marx negara terjadi dalam sejarah perkembangan masyarakat yang meliputi tiga fase (fase borjuis, fase kapitalis, dan fase sosialis-komunis).

3. Teori kebersamaan (integralistik)

Dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat negara memikirkan penghidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya, negara menyatu dengan rakyat dan tidak memihak pada salah satu golongan dan tidak pula menganggap kepentingan pribadi yang lebih diutamakan, melainkan kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Soepomo menanggapi teori integralistik paling sesuai dengan bangsa Indonesia yang masyarakatnya beraneka ragam. Juga secara kenyataan teori ini telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia semenjak dahulu di desa-desa, seperti kebiasaan pemimpin yang selalu bermusyawarah dengan rakyatnya. Hal ini lebih tegas dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan serta menerima paham negara persatuan.

Negara dalam cara pandang integralistik Indonesia tidak akan memiliki kepentingan sendiri (kepentingan pemerintah) terlepas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan orang-orang (rakyat), di dalam negara semua pihak mempunyai fungsi masing-masing dalam suatu kesatuan yang utuh (Prof. Supomo, disebutkan sebagai suatu totalitas.

Pancasila bersifat integralistik karena:

1. mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan,
2. adanya semangat kerjasama (gotong royong),
3. memelihara persatuan dan kesatuan, dan
4. mengutamakan musyawarah untuk mufakat.³³

³³ Syahril Syarbaini, , *Ibid.* hlm 56

BAB V

PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai

Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan merupakan suatu kesatuan yang utuh.³⁴ Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri atau nilai adalah kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai. Di dalam nilai terkandung cita-cita, harapan, dambaan dan keharusan.³⁵

Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila mempunyai tingkatan dan bobot berbeda, namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan akan tetapi nilai-nilai itu saling melengkapi. Hal ini disebabkan sebagai suatu hakikat sila-sila pancasila(subtansi pancasila). Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh atau kesatuan organik. Dengan demikian, berat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan bulat.³⁶

Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai lain atau nilai-nilai yang ada dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola bagi sikap, tingkah dan perbuatan bangsa Indonesia. Pengertian pancasila merupakan suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Antara sila-sila Pancasila saling berkaitan, saling berhubungan secara erat bahkan saling mengkualifikasi.

Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian umum bahwa bagian-bagiannya(sila-silanya) saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.

³⁴Kaelan, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm.66

³⁵Ibid, hlm.123-124.

³⁶Ibid, hlm. 129-130.

Macam-macam Nilai Pancasila

1. Nilai dasar adalah nilai yang dituju atau diinginkan oleh semua manusia, yang didasarkan pada kodrat manusia yang merupakan pencerminan kemanusiaan yang satu sama lain terikat, yang selalu diperjuangkan oleh manusia karena dianggap sebagai sesuatu yang berharga yang dapat memberikan kepuasan batin.

Yang dianggap nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai yang telah diletakkan oleh para pendiri negara berupa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Nilai dasar menjadi sumber gagasan seluruh cipta, rasa, karsa, dan karya bagi segenap upaya dalam melanjutkan perjuangan bangsa untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

2. Nilai instrumental adalah keseluruhan nilai yang dipedomani dalam sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam, yang bersumber pada Nilai Dasar dan bersifat berubah.

Nilai instrumental adalah nilai yang terdapat di dalam Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, GBHN dan ketetapan MPR lainnya, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun hukum positif lainnya.

3. Nilai Praksis adalah nilai yang terkandung dalam sikap perilaku serta perbuatan manusia sehari-hari yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental.

Nilai Praksis berupa sikap perilaku yang berkaitan dengan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kecintaan kepada Tanah Air, dan Kepribadian Bangsa.³⁷

Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai kenikmatan : dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan atau yang menyebabkan orang senang dan atau menderita tidak enak.
2. Nilai-nilai kehidupan : dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan

³⁷Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta : 2010), hlm.140-141

3. Nilai-nilai kejiwaan : dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
4. Nilai-nilai kerohanian : dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai dari yang suci dan tak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.³⁸

Notonegoro membagi nilai menjadi tiga yaitu :

1. Nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
2. Nilai vital, adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani. Nilai kerohanian dapat dibedakan atas empat macam :
 - a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal(ratio, budi, cipta) manusia
 - b. Nilai keindahan, atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia.
 - c. Nilai kebaikan, atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
 - d. Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.³⁹

B. Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila

1. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu dalam zat-Nya, sifat-Nya, dan perbuatan-Nya. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa yaitu suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan demikian, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, termasuk sumber pokok atau norma dasar

³⁸Kaelan, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm.125

³⁹ Ibid, 126

dari segala peraturan-peraturan masyarakat, yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia.⁴⁰

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi yang dimilikinya itu, maka manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Maksudnya sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Dengan demikian kemanusiaan yang adil dan beradab ialah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan atau dengan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya.⁴¹

Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 mewujudkan sila kedua lebih konkrit hak-hak asasi warganegara dan penduduk seperti tercantum pada Pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34 antara lain berbunyi : Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan/penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; berhak atas jaminannya kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya; berhak atas terpeliharanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.⁴²

3. Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan

⁴⁰ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila : Di perguruan Tinggi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm.38-39

⁴¹Ibid., hlm.39.

⁴²Noor Ms. Bakry, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.147

keamanan.⁴³Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia. Maksudnya bahwa rakyat Indonesia sebagai keseluruhan mempunyai tempat tersendiri di atas bumi ini, sebagai tanah air dan tumpah darahnya. Walaupun bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku dan keturunan bangsa , berdiam di atas suatu wilayah luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau tetapi karena sifat kesatuan ini, maka tidak dapat dibagi-bagi dan tidak terpecah-pecah untuk menyeluruh.

Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia.

Nasionalisme sebagai salah satu aspek Persatuan Indonesia, dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dengan kata-kata, bahwa “Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, Negara menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.” Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.⁴⁴

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan.

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh Indonesia , tidak dibedakan fungsi dan profesinya. Kerakyatan adalah rakyat yang hidup dalam ikatan negara. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggungjawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat dan mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata

⁴³ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila : Di Perguruan Tinggi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm.40

⁴⁴ Noor Ms. Bakry, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.148

cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebinjaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat.

Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “...Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat...” . selanjutnya dapat dilihat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal-pasal UUD 1945.⁴⁵

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 memuat norma dasar atau landasan pokok daripada Demokrasi Pancasila, yang berbunyi: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Ini berarti permusyawaratan dari rakyat harus dilakukan melalui badan-badan perwakilan yang telah ditentukan oleh UUD 1945, seperti MPR, DPR, dan DPRD.⁴⁶

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani serta keadilan memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang(keadilan material dan spiritual).

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima ini bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponen masyarakat.

⁴⁵ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila : Di Perguruan Tinggi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm.41

⁴⁶ Noor Ms. Bakry, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.150

Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam dalam negara maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima ini bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan.⁴⁷

Untuk mencapai keadilan sosial, kita harus menempuh cara-cara kekeluargaan di bidang material (kebudayaan) dan di bidang spiritual (keagamaan) :

- a. Bidang material : pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 menggambarkan tujuan Pembangunan Nasional kita adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila.

Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, memuat asas demokrasi ekonomi, artinya demokrasi ekonomi mencita-citakan agar kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan. Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Perkataan “dikuasai” bukan berarti dimiliki tetapi negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan cabang-cabang produksi yang dianggap menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pada pasal 33 ayat 3 kata dikuasai berarti negara mengatur hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang atas bumi, air, dan

⁴⁷ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila : Di Perguruan Tinggi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm.42

kekayaan alam tersebut, serta segala perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan bumi, air, dan kekayaan alam itu. Maksudnya “turut mengatur” agar pemerintah akhirnya bisa mengusahakan tercapainya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Akhirnya , latar belakang seluruh pasal 33 ialah, disatu pihak harus dihindari sistem “freefight liberalism” yang bisa menumbuhkan penghisapan terhadap manusia atau bangsa lain ; sedang dilain pihak harus dihindarkan sistem “etatisme” atau dominasi di bidang ekonomi oleh negara beserta aparaturnya.

b. Bidang spiritual: pasal-pasal 31, 32, dan seterusnya disebutkan : Keadilan Sosial yang hendak dicapai dibidang spiritual adalah keadilan yang menyakut bidang-bidang kebudayaan, pendidikan, agama, kesehatan, dan bidang lain-lain. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut yaitu:

- 1) Tentang bidang kebudayaan disebutkan bahwa: “usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan –bahan baku dari kebudayaan asing yang dapat dikembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri dan seterusnya”.
- 2) Tentang pendidikan disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan hakikatnya merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁴⁸

C. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada setiap individu, perseorangan, setiap warganegara, setiap penduduk Indonesia,

⁴⁸ Noor Ms. Bakry, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.151-153

setiap aparat pelaksana negara, dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini.
- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Sila kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- a. Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
- d. Mengembangkan sikap tenggang rasa
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan

- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
- j. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Sila ketiga : Persatuan Indonesia

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- c. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa
- d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
- g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan negara

4. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- a. Sebagai warganegara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban sama
- b. Tidak boleh memasak kehendak orang lain
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
- f. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
- g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan
- h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
- i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat

manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

- j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan

5. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- d. Menghormati hak orang lain
- e. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
- h. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan bersama
- i. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.⁴⁹

D. Pancasila sebagai Sistem Nilai yang Komprehensif

Pancasila sebagai sistem nilai yang komprehensif yaitu dalam hal ini berkaitan dengan Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Pengertian ideologi secara umum yaitu sekumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang berorientasi pada tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan bidang keagamaan.

Pengertian dari ideologi komprehensif yaitu mengakomodasikan nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial besar-besaran menuju bentuk tertentu. Aspek ideologi komprehensif dalam lingkup hubungan rakyat dan penguasa yaitu negara

⁴⁹ Noor Ms. Bakry, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.154-156

mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk seperti Indonesia dengan ideologi pancasila.⁵⁰

Peranan Ideologi terhadap bangsa dan negara

a. Bangsa

1. Segala macam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasari pada hakikat manusia sebagai monopluralis yang meliputi susunan kodrat manusia, jiwa, dan raga, sifat manusia sebagai makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri dan sebagai makhluk Tuhan YME.
2. Dalam bidang politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu(makhluk sosial) yaitu sebagai masyarakat. Dalam hal ini pengembangan politik harus mendasarkan diri pada moralitas seperti tertuang dalam Pancasila
3. Dalam bidang ekonomi, pemerintah harus terus mendorong sistem perekonomian Indonesia yang mendasarkan diri pada ekonomi kerakyatan dan tidak hanya mendasarkan mengejar pertumbuhan saja.
4. Pengembangan IPTEK harus mendasarkan pada sila pertama yang mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan. Pengembangan IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi dipertimbangkan maksud dan akibatnya.

b. Negara(Pemerintah)

1. Dalam bidang sosial budaya, nilai-nilai pancasila mendasar pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Pancasila harus dijadikan sumber normatif bagi peningkatan humanis dalam bidang sosial budaya.
2. Dalam kehidupan beragama, masyarakat mengembangkan suatu suasana bermasyarakat ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, dan saling menghargai. Agar konflik yang berdasar pada agama dapat diredam dengan baik.

⁵⁰Adam Tirta Putra, *Pancasila sebagai Ideologi Nasional*, <http://adamtirtaputra.blogspot.co.id/2013/05/pancasila-sebagai-ideologi-nasional.html>, diakses pada Rabu 30 November 2016 pukul 21.34 WIB.

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN

A. Pengertian Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *"The Structure Of Scientific Revolution"*. Inti sari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.⁵¹

Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Dalam masalah yang populer ini, istilah "paradigma" berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun bidang pendidikan.⁵²

Pembangunan yang sedang digalakkan perlu sebuah paradigma, yaitu sebuah kerangka berpikir atau sebuah model mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Pembangunan dalam perspektif pancasila adalah pembangunan yang sangat erat muatan nilai yang berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Mengenai pengertian pancasila sebagai paradigma kehidupan yaitu dapat menggerakkan segenap potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur menuju Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran.

Pancasila dapat dijadikan paradigma pembangunan nasional karena nilai-nilai pancasila dapat diterapkan dan sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam pembangunan nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Dalam Undang-Undang alinea ke-IV telah tercantum tujuan dari negara

⁵¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 226.

⁵²Ibid., hal. 227

Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan dalam upaya membangun Indonesia seutuhnya itulah diperlukan penerapan dari nilai-nilai pancasila. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional bidang sosial dan budaya, pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional

Kedudukan pancasila sebagai paradigm pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila pancasila. Hal ini sebagai konsekuensi asas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas pancasila sebagai dasar negara dan ideology nasional karena hakikat nilai sila-sila pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologism manusia sebagai subjek pendukung pokok negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, seluruhnya warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia sebagai “monopluralis”. Unsure-unsur hakikat manusia monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, rohani(jiwa), dan raga. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Paradigm pembangunan bangsa dan negara harus daam suasana baru sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, tetapi tetap berada dalm nilai-nilai dasar pancasila, nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak dasar yang sama, tidak dibedakan dengan keturunan, warna kulit, suku, bangsa dan penggolongan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat daan martabat manusia yang meliputi jiwa dan raga, baik aspek individual maupun aspek social dan religiusnya. Atas dasar pembangunan harus mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan diberbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan meliputi bidang politik, ekonomi, social-budaya, dan pertahanan keamanan.

C. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ilmu dan Teknologi (IPTEK)

Ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang sangat berperan penting dalam kehidupan bagi kaumtersendiri, jadi tidak semua orang dalam kehidupannya ketergantungan dengan ilmu dan teknologi. Bagi kelompok manusia yang menginginkan kemajuan mutlak harus memiliki dua hal tersebut. Iptek bagi manusia berguna untuk memudahkan kehidupan manusia dan mengangkat derajat manusia, oleh karena itu dalam menggunakan iptek kita harus sangat bijak tidak menggunakan dengan seenaknya, bahkan para ilmuwan dan teknokrat menggunakannya sebagai sesuatu yang tidak memanusiakan manusia. Padahal apapun hasil dari iptek tersebut digunakan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan.

Oleh karena itu dalam kondisi di atas maka diperlukan suatu dasar atau pegangan yang mampu dijadikan ruhnya bagi perkembangan iptek di Indonesia. Bangsa Indonesia, dalam seluruh dimensi kehidupannya, termasuk di bidang iptek, terikat pada kuat tidaknya dalam memegang ruh bangsanya, yaitu Pancasila. Pada persoalan di atas bahwasanya pancasila berperan memberikan beberapa prinsip etis kepada iptek, sebagai berikut :

- a. Martabat manusia sebagai pribadi, sebagai subjek tidak boleh diperalat untuk kepentingan iptek, riset.
- b. Prinsip “tidak merugikan”, harus dihindari kerusakan yang mengancam kemanusiaan.
- c. Iptek harus sedapat mungkin membantu manusia melepaskan dari kesulitan-kesulitan kehidupannya.
- d. Harus menghindari adanya monopoli iptek.
- e. Diharuskan ada kesamaan pemahaman antara ilmuwan dan agamawan, yaitu bahwa iman memancar dalam ilmu sebagai usaha memahami “sunnatullah”, dan ilmu menerangi jalan yang telah ditunjukkan oleh iman.⁵³

Pembahasan di atas jika di pandang dari segi ilmu filsafat, maka iptek yang diletakkan di atas pancasila sebagai paradigmanya yang perlu di pahami dasar dan arah penerapannya. Yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

⁵³Rukiyati, dkk, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: UNY Prees, 2013), hlm. 133

Aspek Ontologis, yaitu bahwa hakikat iptek merupakan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran serta kenyataan. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipandang secara utuh sebagai masyarakat, proses, dan produk. Aspek Epistemologi, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai “metode berfikir”, dalam arti sebagai dasar dan arah dalam mengembangkan ilmu, serta sebagai parameter kebenarannya.

Aksiologi, dengan menggunakan epistemologi tersebut kemanfaatan dan efek pengembangan iptek secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila, dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila.⁵⁴ Sebagaimana dinyatakan oleh Teuku Jacob (2000) bahwa perkembangan Iptek dewasa ini dan dimasa yang akan datang sangat cepat, dan mempengaruhi aspek kehidupan dan kebudayaan dengan cepat. Adapun akibat yang baik dari Iptek adalah mengamankan, menyejahterakan, dan menyelamatkan manusia, menambah atau mengurangi jumlah manusia, memperluas cakupannya, menggeser umur matinya, serta mengatasi halangan-halangan temporo-spasial. Dan akibat buruknya adalah mendesak manusia secara temporo-spasial, mengusangkan kelompok yang kurang mujur, merusak kerak bumi dan atmosfer, bahkan membinasakan dirinya, secara individual maupun massal.⁵⁵

D. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUD HANKAM

1. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Politik

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (Sila ke-IV Pancasila).

Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem

⁵⁴Ibid, hlm. 134

⁵⁵Ibid, hlm, 135

politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan.

2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Ekonomi merupakan kesatuan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan produk. Ekonomi memuat dimensi etis, karena pada akhirnya memuat bentuk hubungan antar manusia atau antar kelompok yang diperantarakan oleh hubungan antara manusia dengan alam atau dengan produk yang didistribusikan, dipertukarkan dan dikonsumsi dengan berbagai cara.

Sistem ekonomi harus didasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang didasarkan

pada moralitas dan humanistik akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek.

3. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial-Budaya

Dalam istilah Inggris, “budaya” adalah “culture” yang berarti “mengolah, mengerjakan” terutama mengolah tanah atau bertani. Ini berarti, budaya merupakan aktifitas manusia, bukan aktifitas makhluk yang lain dan menjadi ciri manusia, Hanya manusia yang berbudaya dan membudaya. Berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial

budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

4. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang HanKam

Pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan Negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok Negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan Negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia. Terutama terjaminnya hak-hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.

E. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi

Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu dipertahankan dan mana yang masih perlu diperbaiki. Hal ini mutlak diperlukan dalam upaya pemantapan kebijaksanaan nasional untuk menyongsong dan mencapai masa depan bangsa yang aman dan sejahtera.⁵⁶

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup berkenaan dengan sikap manusia dalam memandang diri dan lingkungannya. Sikap manusia ini dibentuk oleh adanya kekuatan yang bersemayam pada diri manusia, yakni iman, cipta, rasa, dan karsa, yang membentuk pandangan hidup perorangan yang kemudian beradaptasi dengan pandangan hidup perorangan lainnya lalu menjadi pandangan hidup kelompok. Hubungan antara kehidupan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya melahirkan suatu pandangan hidup bangsa. Padmo Wahjono, memberikan

⁵⁶<https://repaldiabdulagi453.wordpress.com/2014/11/26/pancasila-sebagai-paradigma-reformasi/>

arti pandangan hidup ini sebagai “prinsip” atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar; untuk apa seseorang hidup. Oleh karena itu, pandangan hidup bangsa dapat didefinisikan sebagai segenap prinsip dasar yang dipegang teguh oleh suatu bangsa guna memecahkan berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya.

Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-silanya tersebut dari waktu ke waktu dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, dan digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan di dalam segala bidang. Dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kehidupan, baik norma sopan santun maupun norma hukum yang berlaku.⁵⁷

2. Pancasila sebagai Dasar Negara RI

Pancasila sebagai dasar negara RI berarti Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, maka Pancasila mempunyai sifat mengikat keharusan atau bersifat *imperatif*, artinya sebagai norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan maupun dilanggar, sedangkan pelanggaran di atasnya dapat berakibat hukum dikenakannya suatu sanksi.

Mengingat hal itu, meskipun dalam suasana reformasi dan kehidupan demokrasi orang bebas untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya, namun sebaiknya tidak memberikan penafsiran terhadap Pancasila menurut anggapannya sendiri-sendiri, yaitu dalam arti menafsirkan Pancasila itu dengan menggunakan ukuran lain yang tidak bersumberkan pada sila-sila Pancasila sebagaimana termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan; apalagi menafsirkan Pancasila secara lepas/menyimpang dari konteks dasarnya untuk apa Pancasila itu dirumuskan dan digunakan oleh bangsa Indonesia.

⁵⁷ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 5-6

Dari aspek hukum ketatanegaraan Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR-RI No.V/MPR/1973 dan No.IX/MPR/1978.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut dalam sejarah perjuangan nasional dan pengisian kemerdekaan Indonesia telah melahirkan 4 (empat) buah sumber hukum lain. Kaitan Pancasila dengan keempat sumber hukum tersebut dapat dijelaskan, yaitu bahwa adanya proklamasi kemerdekaan menjadi sumber hukum bagi lahirnya Negara RI, adanya Dekrit Presiden menjadi sumber hukum bagi berlakunya kembali UUD 1945, UUD 1945 menjadi sumber hukum bagi penyelenggaraan kehidupan konstitusional bangsa dan negara RI, sedangkan SP 11 Maret 1966 menjadi sumber hukum bagi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.⁵⁸

3. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, yang berkembang akibat dari upaya bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang esensial yang menyangkut makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, yang meliputi antara lain:

- a. alam semesta, seperti bagaimana alam semesta ini terbentuk, bagaimana hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam alam semesta, bagaimana hubungan antar microcosmos dan macrocosmos, siapa pencipta alam semesta dan sebagainya;
- b. manusia dan kehidupannya; siapa sebenarnya manusia itu, darimana asalnya dan kemana kembalinya, bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain, dengan masyarakat, dengan Pencipta manusia, dan sebagainya;

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 8-12

- c. nilai-nilai yang kemudian diangkat menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan; seperti nilai-nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah, berguna dan tidak berguna, dan sebagainya.

Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh bangsa-bangsa yang beradab.⁵⁹

4. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi, Pancasila berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, dan karena itu sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel, dan tidak bersifat tertutup maupun kaku, yang akan menyebabkan ketinggalan zaman.

Mengenai pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukanlah berarti bahwa nilai dasarnya dapat diubah atau diganti dengan nilai dasar yang lain, karena jika dipahami secara demikian (sebagai pemahaman yang keliru), hal itu sama artinya dengan meniadakan Pancasila atau meniadakan identitas/jati diri bangsa Indonesia.

Maka di dalam pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka itu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar daripada Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman.⁶⁰

F. Implementasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan idil bangsa Indonesia, dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegras iselama lebih dari lima puluh tahun. Namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi Negara dalam format politik orde baru banyak menuai kritik dan protes terhadap Pancasila.

Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan dalam pengertian kebahasaan substansinya, tetapi dalam konteks

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 42-43

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 70-71

implementasinya. Tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional.

Pada zaman reformasi, pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena didalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti Negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hakasasi manusia, neo-liberalisme, serta konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berfikir masyarakat Indonesia. Hal demikian dapat meminggirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut dirinci dalam berbagai macam bidang, antara lain:

1. Implementasi Pancasila dalam Bidang Politik

Landasan kekuasaan dan kedaulatan, berada di tangan rakyat. dalam usaha membangun kehidupan politik, maka perlu beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan, antarlain.⁶¹

- a. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka.
- b. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
- c. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis.
- d. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya.

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada ontologisme manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek Negara, oleh karena itu kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik Negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila pancasila,

⁶¹Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.173

sehingga praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.

2. Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi

Dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah “yang kuat yang menang” sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka system ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) terdiri atas beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.⁶²

- a. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang
- b. Mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan
- c. Memiliki etos profesional

3. Implementasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya

Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin credible, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dilakukan melalui cara-cara: ⁶³

- a) dihormati martabatnya sebagai manusia,
- b) diperlakukan secara manusiawi
- c) mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya,
- d) memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan
- e) merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia.

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas system nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya

⁶²ibid hal.174

⁶³ibid hal.174

yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai-nilai budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antar kelompok masyarakat yang muaranya adalah masalah politik.

Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

4. Implementasi Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga Negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan Negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negaranya. Negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan Hankam diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan.

BAB VII

TANTANGAN PANCASILA DALAM ERA GLOBAL

A. Karakteristik Pancasila di Era Globalisasi

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tantangan Pancasila, ada baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan era globalisasi. Globalisasi berasal dari kata Global yang artinya secara umum dan keseluruhan, secara bulat, secara garis besar bersangkut paut dan meliputi seluruh dunia. Mengglobal berarti meluas ke seluruh dunia atau mendunia, dan akhirnya menjadi globalisasi yang artinya proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Manfaat globalisasi bagi bangsa Indonesia antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah arus modal dari negara lain, dan meningkatkan perdagangan internasional.

Globalisasi memiliki nilai positif dan nilai negatif. Untuk mencari nilai positif maka kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Jika kita mengambil nilai-nilai negatif globalisasi, maka yang akan terjadi adalah kaburnya jati diri bangsa Indonesia dan masuknya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Pancasila sangat mungkin mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun demikian faktor manusia baik penguasa maupun rakyatnya, sangat menentukan dalam mengukur kemampuan sebuah ideologi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sebaik apapun sebuah ideologi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang baik, hanyalah angan-angan belaka.

Pancasila sekarang dan dimasa-masa yang akan datang penting bagi paradigma ke arah pembangunan yang baik di segala bidang kehidupan. Jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia yang religius, ramah tamah, kekeluargaan dan musyawarah, serta solidaritas yang tinggi, akan mewarnai jiwa pembangunan nasional baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya.

B. Keterkaitan Dan Pengaruh Globalisasi Terhadap Pancasila

Globalisasi diartikan sebagai suatu era atau zaman yang ditandai dengan perubahan tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

sehingga interaksi manusia menjadi sempit, dunia tanpa ruang.⁶⁴ Era Globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era Globalisasi tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut dapat bersifat positif maupun bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan.

Pada era globalisasi pergaulan dan kompetisi antarbangsa semakin ketat. Batas antarnegara hampir tidak ada, artinya batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antarbangsa yang semakin kental itu akan menjadi proses akultural, yaitu saling meniru dan saling mempengaruhi antarbudaya masing-masing. Hal ini biasanya ditandai oleh dua faktor berikut:

- a. Semakin menonjolnya sikap individualistis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan dengan azas gotong-royong.
- b. Semakin menonjolnya sikap materialistis, yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan.

Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Pengaruh negatif akibat proses akulturasi tersebut dapat meronsong nilai-nilai yang telah ada di dalam masyarakat. Jika semua ini tak dapat dibendung, maka akan mengganggu ketahanan di segala aspek, bahkan mengarah kepada kreditabilitas sebuah ideologi. Untuk membendung arus globalisasi yang sangat deras tersebut, kita harus berupaya untuk menciptakan suatu kondisi agar ketahanan nasional dapat terjaga.⁶⁵

C. Tantangan Pancasila di Era Globalisasi

Jika Pancasila menentang kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme, tidaklah mengherankan kalau ia bertentangan dengan globalisme, yang tidak lain daripada kapitalisme lanjut model Amerika yang sedang berusaha menguasai dunia dalam aspek

⁶⁴ Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 283

⁶⁵ *Ibid*, hlm.385

ekonomi. Neokapitalisme ini bersifat global dan sebagian besar negara sedikit banyak dikuasai, tetapi secara terpisah-pisah.

Globalisasi bertentangan dengan sila ke-1 karena ia membangkitkan materialisme yang menentang spiritualitas dan bangkitnya semangat eksploitatif mondial yang menggerus moral dan etika. Pada globalisasi, hormat terhadap nyawa dan manusia berkurang dengan drastis demi pengejaran kesenangan duniawi dan kebahagiaan yang semu. Demikian pula terjadi komersialisasi agama dan berbagai aspek agama dijadikan komoditas, serta pudarnya substansi agama.⁶⁶

Globalisasi bertentangan dengan sila ke-2. Dengan globalisasi, kemanusiaan dan perikemanusiaan diganti oleh teknologi, dan efisiensi, manusia menjadi using atau menjadi suku mesin-industri (teknologisasi) dan dapat dibuang setiap waktu karena tidak diperlukan lagi. Pada arus globalisasi, hak-hak manusia dan etika dilanggar jika bertentangan dengan usaha mencari laba dan kekuasaan. Globalisasi juga bertentangan dengan sila ke-3, karena hilangnya porositas batas bangsa-bangsa oleh arus bebas faktor-faktor produksi, pelenyapan tarif, tak terkendalinya arus lintas-batas informasi dan nilai-nilai.

Demikian halnya dengan sila ke-4 Pancasila yang juga bertentangan karena globalisme menaikkan per-kapita nasional, tetapi menambah pula presentase orang miskin, sehingga terjadi rekonfigurasi lapisan-lapisan sosial-ekonomis. Globalisme menghalangi kecerdasan dan kesehatan rakyat dengan bertambah mahalnya komoditas ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Tidak hanya sampai di situ Sila ke-5 Pancasila lagi-lagi juga bertentangan dengan globalisme, karena keadilan komutatif, distributif, dan legal diperjualbelikan. Konsumen tidak berhubungan langsung dengan produsen, dan sistem legal dibuat demi keuntungan modal, dan eksploitasi lingkungan dapat mengancam keadilan nasional, regional, internasional maupun intergenerasional, karena hutang dan pajak lingkungan tidak dibayar.⁶⁷

⁶⁶ Gatot Saksono, *Pancasila Soekarno*, (Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2007), hal.90

⁶⁷ *Ibid*, hal.91

D. Cara Pancasila Mengatasi Tantangan dalam Era Modern dan Globalisasi

Hal ini dapat dilakukan dengan menyadarkan kembali reaktualisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks peri kehidupan sehari-hari Bangsa Indonesia. Tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, dan penanaman kembali ide tentang Pancasila sebagai dasar negara sejak dini. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi sudah merupakan tanggung jawab kita bersama, membantu mengatasi Pancasila dalam menghadapi tantangannya dalam era global saat ini. Walaupun banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila bukan merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku tertentu. Pancasila itu netral dan akan hidup di segala zaman seperti yang telah di lewati di tahun-tahun sebelumnya.

E. Peran dan Pengamalan Pancasila dalam Era Modern dan Globalisasi

Disadari atau tidak, selama ini Pancasila hanya sebatas “dihafalkan” bukannya “diamalkan”. Padahal kita tahu betul bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, melainkan nilai-nilai luhur bangsa yang melekat pada diri kita yang harus diamalkan. Supaya itu bisa terjadi, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila perlu ditanam dan dipupuk sehingga dapat tumbuh subur dalam diri setiap anak bangsa, sebagai generasi penerus kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nilai-nilai yang melekat pada sila pertama hingga sila ketiga haruslah tertanam dalam diri pribadi, sedangkan nilai-nilai yang melekat pada sila keempat dan kelima haruslah tertanam dalam perilaku setiap anak bangsa Indonesia.⁶⁸

Penanaman nilai-nilai luhur bangsa dalam diri setiap anak bangsa merupakan suatu proses “pembangunan karakter”, yang seharusnya dilaksanakan secara terus-menerus, terencana, terarah, dan berkesinambungan, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan, terutama dalam menjadikan seseorang mengenal dirinya, mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, mempunyai pengendalian diri yang baik, dan percaya akan dirinya sendiri.

⁶⁸ Prima Roza dkk, Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal.41

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tantangan di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tak mau, suka tak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Peta percaturan politik dunia telah menempatkan dominasi dunia Barat (baca Eropa) dan Amerika sebagai “pemegang saham” terbesar berbagai bidang baik ekonomi, politik, ideologi, budaya di planet bumi. Akibatnya nilai karakter lokal suatu bangsa akan tergerus dan semakin terkikis di tanah airnya sendiri. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tak mesti kehilangan jatidiri, kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia. Mereka kehilangan jatidiri yang sebenarnya sudah jelas tergambar dari nilai-nilai luhur Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Darmadi. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Elly Setiadi,. 2003. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ftot Saksono. 2007. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas
- Hartati Soesmadi. 1985. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Bernegara*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kaelan. 1998. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma
- _____. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- _____. 2016. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma
- Noor Ms Bakry. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Oetojo Oesman Alfian, *Pancasila sebagai Idiologi: dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992
- Roza Prima, dkk. 2015. *Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rukiyati, dkk. 2013. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Soerjanto Poespowadojo. 1944. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subandi Al Marsudi,. 2003. *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrial Syarbaini. 2011. *Pendidikan Pancasila Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia
- _____. 2012. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* edisi kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- https://jurnal.ugm.ac.id/filsafat_ilmu_dan_arah_pengembangan_Pancasila.
- <https://pancasila2013.weebly.com/penerapan-pancasila-dalam-kehidupan.html>